

PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP DAYA TARIK INVESTASI DI KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Neny Widhayanti
nenywidha@yahoo.com

Lutfi Muta'ali
Lutfi.mutaali@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the business judgment of the determinants of investment attractiveness and investment attractiveness ranking among the districts in Nganjuk. The method used is descriptive statistical analysis techniques, scaling, and statistical analysis of Rank Spearman correlation. The data used are the primary data in the form of questionnaires, and secondary data from the data of 2011 Small Business License.

The study presents the characteristics of entrepreneurs and their business. Determinants of investment attractiveness of the area used in the assessment of the business, among others, with the highest score in the apparatus and licensing services, for which both the openness and community support, security in the business, and the availability of road infrastructure, then the third quality of infrastructure roads, acquisition of funding/capital, skills and business skills of the population, and employment opportunities. Fourth on the consistency and the rule of law, bureaucracy in the licensing, funding/capital of cooperatives/banks, and labor costs, wages/salaries for workers.

Keywords: Perception, Business Actor, Investment, Ranking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian pelaku usaha terhadap faktor penentu daya tarik investasi serta pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Metode yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, scalling, dan analisis statistik korelasi Spearman Rank. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner, dan data sekunder berupa data SIUP kecil tahun 2011.

Hasil penelitian menyajikan berbagai karakteristik dari pelaku usaha serta usahanya. Faktor penentu daya tarik investasi daerah yang digunakan dalam pengukuran/penilaian pelaku usaha antara lain dengan skor yang paling tinggi aparatur dan pelayanan dalam perijinan usaha, untuk yang kedua keterbukaan dan dukungan masyarakat, keamanan dalam usaha, dan ketersediaan infrastruktur jalan, kemudian yang ketiga kualitas infrastruktur jalan, perolehan bantuan

dana/modal, kemampuan dan skill usaha penduduk, dan kesempatan kerja. Urutan keempat yakni konsistensi dan penegakan hukum, birokrasi dalam perijinan, bantuan dana/modal dari koperasi/perbankan, dan biaya tenaga kerja, upah/gaji untuk pekerja.

Kata Kunci: Persepsi, Pelaku Usaha, Investasi, Pemingkatan

PENDAHULUAN

Latar belakang dalam penelitian ini yakni otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian, peluang tersebut telah pula menciptakan persaingan yang semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala macam yang terbaik sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri untuk masuk ke wilayah masing-masing.

Sebagai salah satu Kabupaten yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, Kabupaten Nganjuk pun tak kalah gencarnya dalam upaya menarik investor. Wujud nyata dari upaya tersebut ditunjukkan oleh gencarnya upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten baik dalam mengikuti pameran diberbagai daerah, berkunjung ke luar pulau/kota untuk mempromosikan potensi investasi Kabupaten Nganjuk, serta mengundang langsung para investor datang ke Nganjuk agar mereka lebih yakin menanamkan modalnya di Nganjuk. Bukti keseriusan pemerintah Kabupaten, salah satunya ditunjukkan oleh terus meningkatnya anggaran yang

digunakan untuk promosi dari tahun ke tahun.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji karakteristik pelaku usaha serta usahanya di Kabupaten Nganjuk, mengetahui penilaian pelaku usaha terhadap faktor daya tarik investasi di Kabupaten Nganjuk, pemingkatan daya tarik investasi antar kecamatan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan persepsi pelaku usaha, mengetahui implikasi kebijakan dari pemerintah berdasarkan persepsi pelaku usaha dalam daya tarik investasi antar kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

Secara teori dapat terlihat bahwa, secara umum, persepsi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu persepsi personal dan persepsi sosial (masyarakat). Persepsi personal adalah proses berpikir seseorang sehingga mampu memberikan penafsiran khusus terhadap situasi tertentu (Luthan 1981 dalam Ritohardoyo, 1995). *Person perception* adalah proses pembentukan kesan berdasarkan pengamatan ataupun penalaran terhadap suatu hal yang mempunyai pengaruh fisik maupun psikologi (Harvey dan Smit, 1977 dalam Ritohardoyo, 2006:46). Sedangkan Dengan demikian persepsi bersifat sangat subyektif karena sangat tergantung pada perseptor atau orang yang berpersepsi.

Pengertian investasi menurut James C Van Horn (1981)

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Menurut Fitz Gerald (1978), Yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Model kajian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

1. Penentuan sampel responden

Responden pada penelitian ini adalah pelaku usaha, dipilih berdasarkan sistem pengambilan sampel secara sampling kuota. Pengambilan sampelnya sesuai dengan data Dinas Perijinan (SIUP kecil tahun 2011).

2. Pengolahan data dan analisis data

Analisis data dilakukan dengan mengolah data primer kualitatif menjadi kuantitatif dengan menggunakan skoring dan skala pengukuran *ratings* (peringkat). Teknik analisis skoring yakni pemberian skor terhadap jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif yang diperlukan. Hal tersebut dapat diuraikan sesuai tujuan penelitian berikut:

1. Cara menganalisis karakteristik pelaku usaha serta usaha sesuai bidangnya, dengan menggunakan analisis deskriptif.

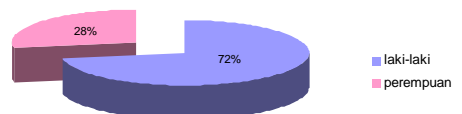
2. Cara mengetahui penilaian pelaku usaha terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan teknik analisis skoring merupakan pemberian skor terhadap jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif yang diperlukan.
3. Cara pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan persepsi pelaku usaha. Dengan menggunakan skala pengukuran *ratings* (peringkat), yaitu sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir atau item.

Sebagai informasi tambahan yakni menganalisis implikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menurut persepsi pelaku usaha dengan menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pelaku Usaha dan Usahanya

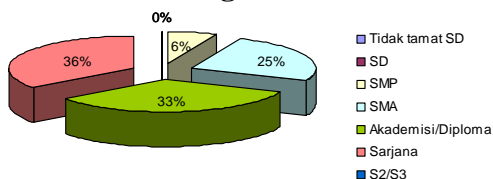
Karakteristik Jenis kelamin Pelaku Usaha



Sesuai dengan diagram berikut merupakan jumlah pelaku usaha laki-laki lebih besar daripada jumlah pelaku usaha perempuan, yaitu sebanyak 72% pelaku usaha laki-laki dan 28% pelaku usaha perempuan. Hal ini berkaitan dengan peranan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat lebih dominan dan aktif dalam berpersepsi serta dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau mendirikan usaha. Hal ini memberikan implikasi bahwa peranan

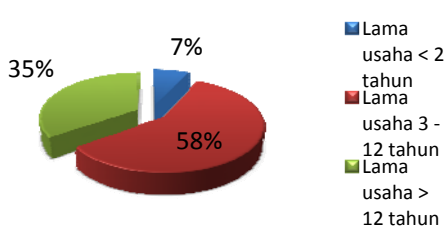
sumberdaya manusia dalam pembangunan paling banyak adalah laki-laki. Pelaku usaha yang merupakan obyek yang dikaji pada penelitian ini, maka memberikan gambaran peranan pelaku usaha laki-laki lebih banyak daripada pelaku usaha perempuan.

Karakteristik Tingkat Pendidikan



Lebih dari setengahnya memiliki pendidikan tinggi yaitu akademisi/diploma sampai jenjang sarjana. Yaitu sebesar 33% berpendidikan akademisi/diploma, 36% berpendidikan hingga sarjana. Namun pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha tidak sampai S2/S3. Untuk pelaku usaha yang pendidikannya masih rendah yaitu tidak tamat SD dan SD sebesar 0% atau tidak ada pelaku usaha yang berpendidikan sampai SD dan tidak tamat SD, sedangkan tamat SMA sebesar 25% dan tamat SMP sebesar 6%. Hal tersebut dapat juga terlihat dari diagram berikut:

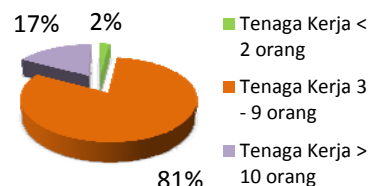
Karakteristik Lama Usaha



Sesuai dengan hasil survei, terlihat pada diagram 58% pelaku usaha membangun usaha sudah 3-12 tahun. Hal demikian memberikan alasan bahwa usaha yang dibangun rentangnya cukup lama, dan sudah

dapat bertahan selama rentang tahun tersebut. Selain itu juga dapat memberikan alasan karena sudah cocok dan membangun usaha di Kabupaten Nganjuk. Kemudian 35% lama usaha yang dibangun pelaku usaha lebih dari 12 tahun. Hal tersebut dapat dikarenakan alasan usaha turun temurun, dan juga merupakan penduduk asli Kabupaten Nganjuk sehingga lama usaha yang dibangunpun sudah berdiri sejak dahulu. Dan yang terakhir untuk lama usaha kurang dari 2 tahun mendapatkan persentase 7%.

Karakteristik Jumlah Tenaga Kerja



Terlihat pada diagram di atas terdapat persentase jumlah tenaga kerja dalam usaha yang dibangun pelaku usaha pada masing-masing bidang yang digeluti. Dari 47 pelaku usaha serta usaha yang dibangun, 81% memiliki jumlah tenaga kerja 3 – 9 orang. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja lebih dari 10 hanya 17% dan jumlah tenaga kerja kurang dari 2 sebesar 2% saja. Sesungguhnya dengan adanya suatu usaha tersebut untuk memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran yang ada maupun menyerap tenaga kerja baru merupakan satu kesatuan usaha di dalam seluruh usaha pembangunan. Dalam hal ini jumlah tenaga kerja yang paling tinggi sebesar 22 tenaga kerja, usaha tersebut di bidang keuangan yakni koperasi simpan pinjam (KSP).

2. Penilaian persepsi pelaku usaha terhadap faktor-faktor daya tarik investasi di Kabupaten Nganjuk

Penilaian pelaku usaha berdasarkan variabel-variabel pada faktor penentu daya tarik investasi daerah yang digunakan dalam pengukuran/penilaian pelaku usaha antara lain aparatur dan pelayanan dalam perijinan usaha, Perda dan kebijakan, Perolehan bantuan dana/modal, Konsistensi dan penegakan hukum, Keamanan dalam usaha, Birokrasi dalam perijinan, Keterbukaan dan dukungan masyarakat, Kemampuan dan skill usaha penduduk, kontribusi dari sektor primer, sekunder, dan tersier, Bantuan dana/modal dari koperasi/perbankan, Kesempatan kerja, Biaya tenaga kerja, upah/gaji untuk pekerja, Ketersediaan tenaga kerja, Ketersediaan infrastruktur, dan Kualitas infrastruktur jalan. Berikut merupakan tabel dari bobot penilaian pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk:

Tabel Bobot Penilaian Pelaku Usaha terhadap faktor daya tarik investasi di Kabupaten Nganjuk

No	Variabel dalam faktor daya tarik investasi (Pernyataan)	Skor (bobot)
1	Aparatur dan pelayanan baik	151
2	Perda dan kebijakan sudah sesuai	88
3	Perolehan bantuan dana/modal mudah	119
4	Konsistensi dan penegakan hukum tegas	101
5	Keamanan sudah terjaga dengan baik	129
6	Birokrasi perijinan bersifat transparansi	111

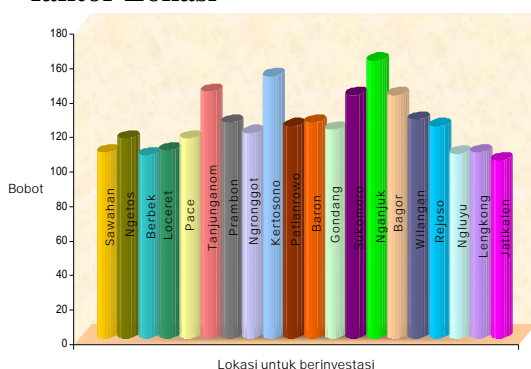
7	Adanya keterbukaan dan dukungan masyarakat baik	146
8	Kemampuan dan skill usaha penduduk cukup baik	117
9	Adanya kontribusi penuh dari sektor	85
10	Perbankan membantu dalam keuangan usaha	105
11	Kesempatan kerja cukup	118
12	Biaya tenaga kerja, upah/gaji untuk pekerja cukup	102
13	Ketersediaan tenaga kerja memadai	89
14	Ketersediaan infrastruktur jalan memadai.	135
15	Kualitas infrastruktur jalan baik	122

Pengukuran/penilaian pelaku usaha antara lain dengan skor yang paling tinggi aparatur dan pelayanan dalam perijinan usaha, untuk yang kedua keterbukaan dan dukungan masyarakat, keamanan dalam usaha, dan ketersediaan infrastruktur jalan, kemudian yang ketiga kualitas infrastruktur jalan, perolehan bantuan dana/modal, kemampuan dan skill usaha penduduk, dan kesempatan kerja. Urutan keempat yakni konsistensi dan penegakan hukum, birokrasi dalam perijinan, bantuan dana/modal dari koperasi/perbankan, dan biaya tenaga kerja, upah/gaji untuk pekerja. Dan yang terakhir

perda dan kebijakan, adanya kontribusi dari sektor primer, sekunder, dan tersier, dan ketersediaan tenaga kerja.

3. Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan persepsi pelaku usaha.

Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor Lokasi



Pada diagram tersebut merupakan informasi yang menunjukkan peringkat dari yang tertinggi sampai terendah. Dalam hal ini terdapat 20 Kecamatan yang diperingkatkan menurut faktor lokasi untuk berinvestasi/membangun usaha. Untuk peringkat 5 besar teratas diperoleh dari Kecamatan Nganjuk, Kertosono, Tanjunganom, Sukomoro, dan Bagor. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor yang tertinggi. Sedangkan untuk peringkat 5 besar kebawah diperoleh untuk Kecamatan Sawahan, Lengkong, Ngluyu, Berbek, dan Jatikalén. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor terendah, sehingga memiliki peringkat terendah. Terkait dengan faktor lokasi yang mendasari pada pemeringkatan ini,

memang kelima besar kecamatan teratas tersebut merupakan pusat-pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut diartikan secara administratis, bahwa Kecamatan Nganjuk memiliki peringkat yang pertama teratas karena kecamatan tersebut sebagai ibukota dari Kabupaten Nganjuk itu sendiri sehingga dijadikan pusat aktivitas dan pelayanan bagi masyarakat.

Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor Potensi ekonomi

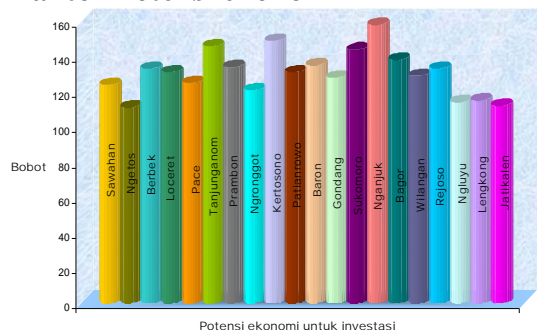
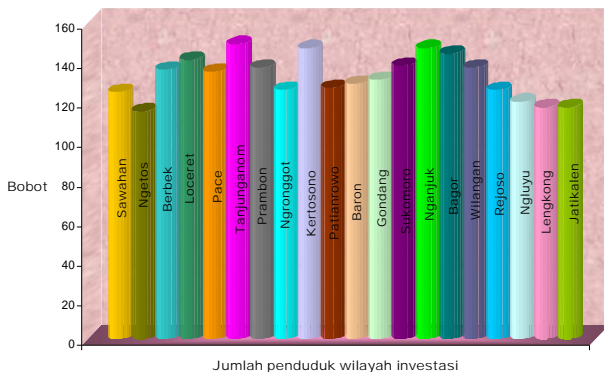


Diagram diatas menunjukkan peringkat dari yang tertinggi sampai terendah. Dalam hal ini terdapat 20 Kecamatan yang diperingkatkan dilihat dari potensi ekonomi untuk berinvestasi atau membangun usaha. Sesuai dengan penilaian pelaku usaha, untuk peringkat 5 besar teratas masih sama dengan faktor lokasi sebelumnya yakni diperoleh dari Kecamatan Nganjuk, Kertosono, Tanjunganom, Sukomoro, dan Bagor. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor yang tertinggi. Sedangkan untuk peringkat 5 besar kebawah diperoleh untuk Kecamatan Ngronggot, Lengkong, Ngluyu, Jatikalén dan Ngetos. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor terendah,

sehingga memiliki peringkat terendah sesuai dengan penilaian pelaku usaha.

Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor Penduduk



Sesuai dengan hasil kuisioner yang diberikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk dengan cara memberikan penilaian terhadap 20 kecamatan dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduk untuk daerah investasi/usaha. Sesuai dengan penilaian pelaku usaha, untuk peringkat 5 besar teratas dengan faktor jumlah dan kepadatan penduduk terletak pada Kecamatan Tanjunganom, Kertosono, Nganjuk, Bagor dan Loceret. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor yang tertinggi. Sedangkan untuk peringkat 5 besar kebawah diperoleh untuk Kecamatan Sawahan, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen dan Ngetos. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor terendah, sehingga memiliki peringkat terendah sesuai dengan penilaian pelaku usaha. Untuk kelima kecamatan teratas antara lain Kecamatan Tanjunganom, Kertosono, Nganjuk, Bagor dan Loceret memiliki kepadatan penduduk yang padat.

Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor Infrastruktur fisik



Pemeringkatan daya tarik investasi di tinjau dari infrastruktur fisik di Kabupaten Nganjuk secara spasial yakni peringkat dari yang tertinggi sampai terendah berdasarkan penilaian pelaku usaha. Dalam hal ini terdapat 20 Kecamatan yang diperingkatkan dilihat dari kondisi infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung investasi/usaha. Sesuai dengan penilaian pelaku usaha, untuk peringkat 5 besar teratas terletak pada Kecamatan Nganjuk, Sukomoro, Prambon, Bagor, dan Tanjunganom. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor yang tertinggi. Sedangkan untuk peringkat 5 besar kebawah diperoleh untuk Kecamatan Rejoso, Ngetos, Ngluyu, Lengkong dan Jatikalen. Kelima kecamatan tersebut memiliki jumlah skor terendah, sehingga memiliki peringkat terendah sesuai dengan penilaian pelaku usaha.

4. Implikasi kebijakan dan Arahan kebijakan

Implikasi kebijakan dari pemerintah untuk dunia usaha berdasarkan persepsi pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini untuk implikasi kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah dampak atau pengaruh yang dilakukan pemerintah terhadap dunia usaha dengan peraturan dan kebijakan yang telah digunakan. Sesuai dengan *indept interview* yang dilakukan pada saat survei lapangan, jika dikelompokkan terdapat beberapa implikasi kebijakan dari pemerintah. Pelaku usaha tersebut mempunyai pendapat tentang implikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan dunia usaha di Kabupaten Nganjuk. Masing-masing pelaku usaha memiliki persepsi yang berbeda-beda.

Pengelompokan persepsi pelaku usaha tentang implikasi kebijakan dari pemerintah terhadap daya tarik investasi Kabupaten Nganjuk antara lain dengan adanya usaha-usaha tersebut, persaingan antar usaha semakin ketat/besar, iklim investasi tidak kondusif, memiliki jiwa berwirausaha, pengenaan pajak yang tinggi, dan ditemukannya perda tentang investasi.

Persaingan usaha semakin besar disini bermakna dengan mudahnya proses perijinan untuk mendirikan usaha, maka masyarakat bersaing dalam membangun usaha dan dapat memanfaatkan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari penduduknya sendiri, masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan, dengan adanya peraturan ataupun perijinan yang dibuat oleh pemerintah tentang usaha, dengan adanya program sosialisasi dari pemerintah maka akan

mempermudah mendidik dan mengubah pola pikir masyarakat yang pengangguran (belum mempunyai pekerjaan tetap) membuka peluang usaha. Selanjutnya untuk ditemukan perda terkait dengan investasi yakni adanya peraturan daerah tentang investasi di Kabupaten Nganjuk.

Adanya investor/pelaku usaha masuk ke daerah, dapat dikaitkan dengan perkembangan suatu kota dapat dipengaruhi oleh pusat-pusat pertumbuhan untuk perkembangan kotanya. Misalnya pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi lainnya. Pertumbuhan ini akan terjadi pada daerah belakangnya melalui '*spread affect*' dan menyerap melalui '*backwash effect*'. Untuk pengenaan pajak yang tinggi, pajak disini adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang termasuk pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, dan bantuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB perkotaan dan perdesaan, serta bea perolehan

hak atas tanah dan banguna. Pajak-pajak tersebut yang merupakan salah satu kendala dalam suatu pendirian usaha.

Selain itu, terdapat iklim investasi yang tidak kondusif, dengan adanya perijinan usaha sulit (berbelit-belit), pemerintahan yang tidak stabil, serta birokrasi yang berbelit-belit dan sulit.

Arahan Kebijakan dari Pemerintah terkait dengan Daya Tarik Investasi di Kabupaten Nganjuk

Salah satu syarat dalam perkembangan perkotaan yakni apabila tidak ada kebijaksanaan intervensi dengan mekanisme pasar, maka pertumbuhan ekonomi ini cenderung akan memperkuat ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah (Myrdal, 1976 dalam Muta'ali 1999). Selain itu, bahwa setiap wilayah mempunyai perbedaan struktur ekonomi. Perbedaan ini dipengaruhi antara lain oleh adanya perbedaan latar belakang historis dan potensi sumberdaya manusia pada wilayah-wilayah tersebut. (Boudeville, 1966 dalam Muta'ali 1999).

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan

memenangkan persaingan. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah perekonomian dapat berkembang optimal.

KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi pelaku usaha adalah sebagian besar memiliki jenjang pendidikan tinggi yaitu diploma bahkan S1. Selain itu pelaku usaha sebagian besar merupakan masyarakat asli, pelaku usaha dari berbagai sektor memiliki pendapatan bervariasi dari rendah hingga sangat tinggi, pelaku usaha sebagian besar berada pada usia produktif (14-64 tahun) dan alasan pelaku usaha mendirikan usaha sebagian besar untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk karakteristik usaha yakni lama usaha yang dibangun pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk dibagi menjadi tiga kelas dalam tahun lama usaha, antara lain kurang dari 2 tahun, 3 – 12 tahun, dan lebih dari 12 tahun. Dari 47 pelaku usaha 58% pelaku usaha membangun usaha antara 3-12 tahun. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja juga dibagi menjadi tiga kelas, antara lain jumlah tenaga kerja kurang dari 2 orang, 3-9 orang, dan lebih dari 10 orang. Dari 47 pelaku usaha yang paling besar yakni 81%

pelaku usaha memiliki jumlah tenaga kerja antara 3-9 orang.

2. Penilaian pelaku usaha antara lain dengan skor yang paling tinggi aparatur dan pelayanan dalam perijinan usaha, untuk yang kedua keterbukaan dan dukungan masyarakat, keamanan dalam usaha, dan ketersediaan infrastruktur jalan, kemudian yang ketiga kualitas infrastruktur jalan, perolehan bantuan dana/modal, kemampuan dan skill usaha penduduk, dan kesempatan kerja. Urutan keempat yakni konsistensi dan penegakan hukum, birokrasi dalam perijinan, bantuan dana/modal dari koperasi/perbankan, dan biaya tenaga kerja, upah/gaji untuk pekerja. Dan yang terakhir perda dan kebijakan, adanya kontribusi dari sektor primer, sekunder, dan tersier, dan ketersediaan tenaga kerja.
3. Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor lokasi untuk berinvestasi/membangun usaha, peringkat pertama diperoleh pada Kecamatan Nganjuk, sedangkan peringkat terakhir terletak di Kecamatan Jatikalén. Untuk pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan menurut ditinjau dari faktor potensi ekonominya untuk berinvestasi/membangun usaha peringkat pertama masih sama yakni Kecamatan Nganjuk, namun untuk peringkat terakhir yakni pada Kecamatan Ngetos. Pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor Jumlah dan Kepadatan Penduduk di

sekitar daerah untuk berinvestasi/membangun usaha, peringkat pertama diperoleh pada Kecamatan Tanjunganóm, sedangkan peringkat terakhir terletak di Kecamatan Ngetos. Untuk yang terakhir pemeringkatan daya tarik investasi antar kecamatan ditinjau dari faktor infrastruktur fisik disekitar daerah untuk berinvestasi/membangun usaha, peringkat pertama diperoleh pada Kecamatan Nganjuk, sedangkan peringkat terakhir terletak di Kecamatan Jatikalén.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, B. (2005). *Pemahaman Dasar: Regional Management dan Regional Marketing*. Semarang. IAP
- Boudeville, J.R. (1966). *Problem of Regional Economic Planning*. Edinburg U.P
- KPPOD. (2002,2003). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga Kuncoro, M.
- Mantra, Ida. B. (1998). *Metode Penelitian Survei dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muta'ali, Luthfi. (1999). *Penerapan Konsep Pusat Pertumbuhan dalam Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.